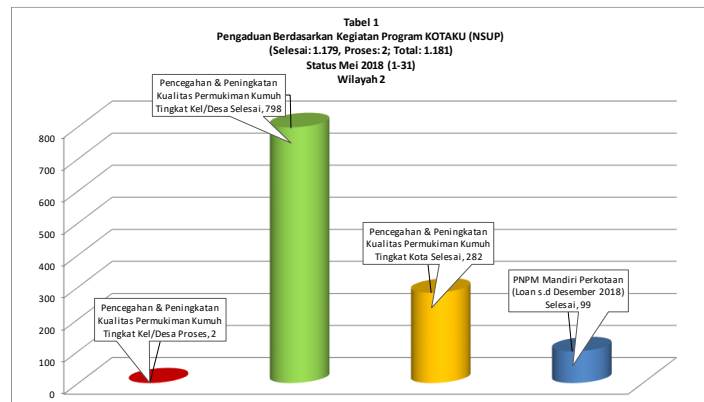


**Progres Pengelolaan Informasi dan Masalah (PIM)
Program KOTAKU (NSUP)
(Kota Tanpa Kumuh)
Periode Mei 2018
Wilayah 2
(OSP 5, OSP 6, OSP 7, OSP 8, OSP 9)**

Pendahuluan

Pada bulan Mei 2018, total pengaduan yang telah dikelola di seluruh program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) wilayah - 2 (dua) berjumlah 1.181 pengaduan (selesai 1.179 (99,8%), proses 2 (0,2%) pengaduan). Data bulan ini bila dibandingkan dengan data



bulan lalu terjadi penurunan data sebanyak 62 pengaduan (data bulan lalu sebanyak 1.243 pengaduan). Penurunan data ini disebabkan antara lain karena ada penurunan jumlah data pengaduan yang dikirim oleh OSP Provinsi (hasil agregat data dari Kabupaten/Kota).

Progres pengaduan di bulan Mei 2018 antara lain (lihat tabel 1) adalah berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan program KOTAKU pencegahan dan peningkatan kumuh tingkat kota yang didominasi oleh Provinsi Sulawesi Utara (88 pengaduan) dan Provinsi Sulawesi Tenggara (29 pengaduan). Selengkapnya dapat dilihat di tabel 1a.

Untuk pengaduan dalam pelaksanaan kegiatan program KOTAKU pencegahan dan peningkatan kumuh tingkat Kelurahan/Desa (800 pengaduan) yang paling banyak diadakan adalah mengenai Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPBK Lanjutan (255 pengaduan atau 32%) sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan pecegahan dan peningkatan kumuh tingkat Kabupaten/Kota (282 pengaduan) yang paling banyak diadakan adalah mengenai penetapan pagu alokasi BDI (88 pengaduan atau 31%), dan untuk lokasi bekas dampingan PNPM Mandiri Perkotaan (99 pengaduan) yang banyak diadakan adalah

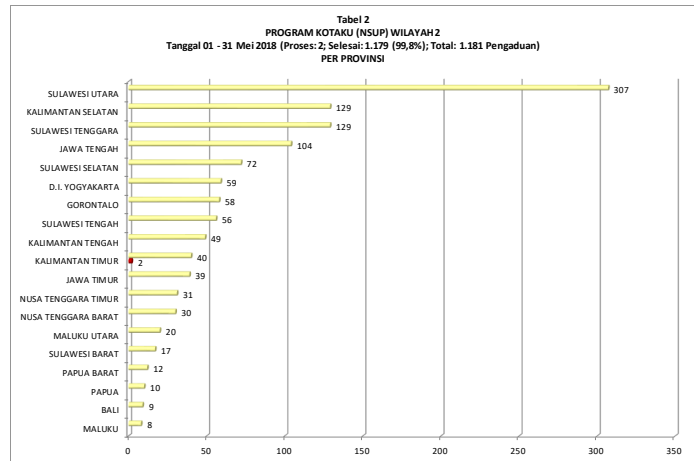
JENIS KEGIATAN/PROVINSI/STATUS/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2	BAL	D	YOGYAKARTA	JAWA TENGAH	JAWA TIMUR	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN UTARA	MALUKU	MALUKU UTARA	NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR	PAPUA	PAPUA BARAT	SULAWESI BARAT	SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGGARA	SULAWESI UTARA	Grand Total	
Pencegahan & Peningkatan Kualitas Permukiman	9	33	40	86	24	81	36	26	6	17	17	20	7	6	5	44	38	95	210	800
Proses																				2
Selesai	9	33	40	86	24	81	36	24	6	17	17	20	7	6	5	44	38	95	210	798
Pencegahan & Peningkatan Kualitas Permukiman																				
Kumuh Tingkat Kel/Desa	15	6	18	13	24	10	1	3	10	10	5	11	23	16	29	88	282			
Selesai	15	6	18	13	24	10	1	3	10	10	5	11	23	16	29	88	282			
PNPM Mandiri Perkotaan (Loan s.d Desember 2018)	11	12	2	24	13	6	1	3	1	3	1	1	5	2	5	9	99			
Selesai	11	12	2	24	13	6	1	3	1	3	1	1	5	2	5	9	99			
Grand Total	9	59	58	104	39	129	49	42	8	20	30	31	10	12	17	72	56	129	307	1181

pelaksanaan kegiatan pemilu BKM (PNPM Mandiri Perkotaan) (28 pengaduan atau 28%).

Dari tanggal 01 s/d 31 Mei 2018. Pengaduan yang terjadi dari tanggal 01 Mei 2018 sampai dengan 31 Mei 2018 sebanyak 1.181 pengaduan (selesai 1.179 (99,8%), proses 2

(0,2%) pengaduan).

Pada tabel 2 terlihat bahwa seluruh Provinsi ada pengaduannya yang terjadi dari tanggal 01 sampai 31 Mei 2018.



A. Progres PIM di program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) Wilayah-2 Periode Mei 2018

1. Gambaran Umum

INFORMATIF				
NO.	KATEGORI	SELESAI	PROSES	TOTAL
1	Kritik	60	-	60
2	Saran	73	2	75
3	Pertanyaan	1,042	-	1,042
Sub Total		1,175	2	1,177
MASALAH				
NO.	KATEGORI	SELESAI	PROSES	TOTAL
1	Mekanisme & Prosedur	4	-	4
2	Penyimpangan Dana	-	-	-
3	Intervensi Negatif	-	-	-
4	Perubahan Kebijakan	-	-	-
5	Kode Etik	-	-	-
6	Force Majeur	-	-	-
Sub Total		4	-	4
TOTAL		1,179	2	1,181
Persentase		99.8%	0.2%	

Sumber: Data SIM PPM 31 Mei 2018

Progres ini merupakan rekapitulasi dokumen hasil PIM di Program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) wilayah - 2 yang terjadi pada tanggal 01 Mei sampai dengan 31 Mei 2018, total pengaduan yang telah dikelola berjumlah 1.181 pengaduan. Dari total pengaduan tersebut status selesai sejumlah 1.179 (99,8%) pengaduan dan status proses sejumlah 2 (0,2%) pengaduan, berupa; pengaduan informatif sejumlah 1.177 (99,6%) [selesai 1.175 (99,8%), proses

2 (0,2%)] pengaduan. Sedangkan pengaduan masalah sejumlah 4 (0,4%) [selesai 4 (100%), proses 0 (0%)] pengaduan. Adapun selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3 jumlah pengaduan berdasarkan sifat pengaduan.

Perbandingan jumlah Kelurahan/Desa dengan jumlah pengaduan per Provinsi yang di input mulai 01 Mei – 31 Mei 2018 (tanggal kejadian) berdasarkan Provinsi dengan jumlah kelurahan terbanyak, yaitu Provinsi Jawa Tengah (1983 Kelurahan) memperoleh 5,2% dan Provinsi dengan jumlah kelurahan sedikit, yaitu Provinsi Sulawesi Barat (17 Kelurahan) memperoleh 100%. (Lihat tabel 4)

Adapun rata-rata pengaduan PROGRAM KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) Wilayah - 2 periode 01 – 31 Mei 2018 sebesar 19%.

Sedangkan provinsi yang persentase pengaduan di bawah 10% berdasarkan tabel 4 adalah Jawa Tengah (5,2%), Jawa Timur (2%), dan Bali (7%).

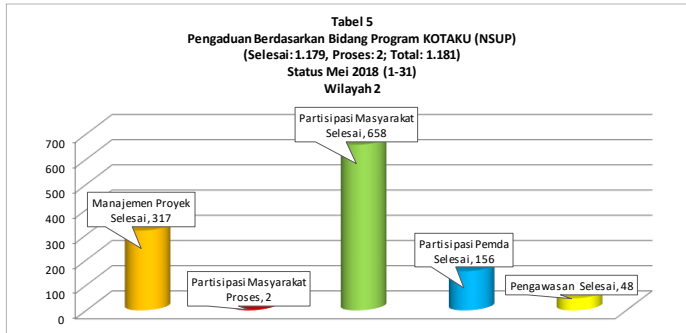
Secara keseluruhan selama periode 01 – 31 Mei 2018 jumlah pengaduan yang masuk ada 1.181 pengaduan dengan tingkat penyelesaian 99,8%.

Tabel 4
Perbandingan Jumlah Kelurahan Dengan Jumlah Pengaduan
Periode 01 - 31 Mei 2018 Program KOTAKU (NSUP) Wilayah 2

Provinsi	Jml Kel	Jml Pengdn	Jml %	Selesai	Jml %	Proses	Jml %
Jawa Tengah	1,983	104	5.2	104	100.0	-	-
DI Yogyakarta	178	59	33	59	100.0	-	-
Jawa Timur	1,857	39	2	39	100.0	-	-
Bali	130	9	7	9	100.0	-	-
Nusa Tenggara Barat	219	30	14	30	100.0	-	-
Nusa Tenggara Timur	130	31	24	31	100.0	-	-
Kalimantan Tengah	41	49	120	49	100.0	-	-
Kalimantan Selatan	239	129	54	129	100.0	-	-
Kalimantan Timur	145	42	29	40	95.2	2	-
Sulawesi Utara	307	307	100	307	100.0	-	-
Sulawesi Tengah	58	56	97	56	100.0	-	-
Sulawesi Selatan	321	72	22	72	100.0	-	-
Sulawesi Tenggara	129	129	100	129	100.0	-	-
Gorontalo	73	58	79	58	100.0	-	-
Sulawesi Barat	17	17	100	17	100.0	-	-
Maluku	84	8	10	8	100.0	-	-
Maluku Utara	152	20	13	20	100.0	-	-
Papua Barat	41	12	29	12	100.0	-	-
Papua	39	10	26	10	100.0	-	-
Total	6,143	1,181	19	1,179	99.8	2	0.2

2. Pengaduan Berdasarkan Bidang Pengaduan

Berdasarkan bidang pengaduan dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: (1)



(2) manajemen proyek, (3) partisipasi Pemda, dan (4) partisipasi masyarakat. Bidang pengaduan tersebut tercakup dalam lingkup administrasi teknis dan keuangan. Adapun lingkup

administrasi teknis mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) termasuk administrasi penyaluran BDI (bantuan dana investasi). Sedangkan lingkup keuangan mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan pembayaran dan pemanfaatan kegiatan program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) di wilayah masing-masing.

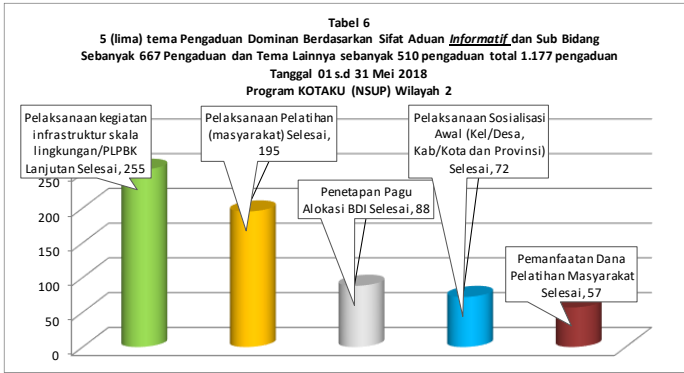
Pada tabel 5 untuk pengaduan dalam kategori bidang manajemen proyek sebanyak 317 pengaduan (selesai 317 (100%), proses 0 (0%) pengaduan); bidang partisipasi masyarakat sebanyak 660 pengaduan (selesai 658 (99,7%), proses 2 (0,3%) pengaduan); bidang partisipasi Pemda sebanyak 158 pengaduan (selesai 156 (100%), proses 0 (0%) pengaduan); dan bidang pengawasan sebanyak 48 pengaduan (selesai 48 (100%), proses 0 (0%) pengaduan).

BIDANG/PROVINSI/STATUS/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2	Grand Total																			
	BALIK NEGERI	DIYOGYAKARTA	JAWABARA	JAWATIMUR	KALIMANTAN	KALIMANTAN	KALIMANTAN	MALUKU	MALUKU	NUSSA TENGGARA	NUSSA TENGGARA	PAPUA	PAPUA	SULAWESI	SULAWESI	SULAWESI	SULAWESI			
Manajemen Proyek	2	20	12	63	10	34	8	2	3	8	12	3	4	7	17	4	47	61	317	
Selesai	2	20	12	63	10	34	8	2	3	8	12	3	4	7	17	4	47	61	317	
Partisipasi Masyarakat	7	33	42	32	22	85	49	30	4	15	18	14	7	6	4	41	35	70	146	660
Proses									2										2	
Selesai	7	33	42	32	22	85	49	28	4	15	18	14	7	6	4	41	35	70	146	658
Partisipasi Pemda		6	2	6	7	10		4		2	3	5		2	6	12	11	10	70	156
Selesai		6	2	6	7	10		4		2	3	5		2	6	12	11	10	70	156
Pengawasan				2	3					2	1					2	6	2	30	48
Selesai				2	3					2	1					2	6	2	30	48
Grand Total	9	59	58	104	39	129	49	42	8	20	30	31	10	12	17	72	56	129	307	1181

Selengkapnya lihat tabel 5a per provinsi.

3. Pengaduan berdasarkan Sifat Pengaduan

Berdasarkan sifat pengaduan, maka pengelolaan pengaduan masyarakat pada program



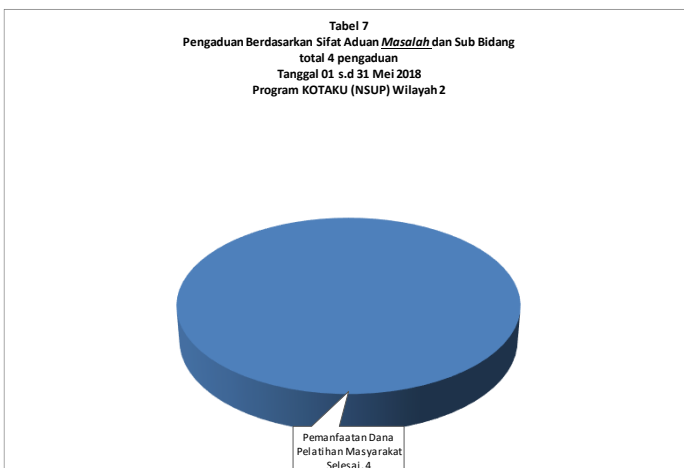
KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) ada dua (2), yaitu Informatif dan Masalah. Yang dimaksud dengan pengaduan informatif adalah pengaduan yang berupa kritik, saran serta pertanyaan. Jadi ketiga unsur pengaduan informatif

tersebut **harus** dimasukan dalam format manual PIM berbasis Ms. Excel. Demikian juga

dengan pengaduan yang bersifat masalah adalah pengaduan yang terkait dengan unsur mekanisme & prosedur, penyimpangan dana, intervensi negatif, perubahan kebijakan, kode etik, dan force majeure.

Tabel 6a		INFORMATIF/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2																			Grand Total
		BAL	DI	GORONTALO	JAWA	JAWA	KALI	KALI	KALI	MALUKU	MALUKU	NUSA	NUSA	PAPUA	PAPUA	SULAWESI	SULAWESI	SULAWESI	SULAWESI		
Pelaksanaan kegiatan infrastruktur skala lingkungan/PLPBK Lanjutan	Selesai	5	13	23	6	23	20	8	2	6	10	2	3	1	20	6	18	89	255		
Pelaksanaan Pelatihan (masyarakat)	Selesai	2	11	10	51	4	20	2	1	2	1	7	3	1	2	6	28	44	195		
Penetapan Pagu Alokasi BDI	Selesai	1	1	8	5	10	2	1	7	5	3	4	9	17	16	88	88	88	88		
Pelaksanaan Sosialisasi Awal (Kel/Desa, Kab/Kota dan Provinsi)	Selesai														2	1	6	63	72		
Pemanfaatan Dana Pelatihan Masyarakat	Selesai	1	4	10	1	1	6	3	1	1	2						3	1	23	57	
Grand Total		3	21	33	83	16	59	23	12	4	10	20	16	6	5	7	41	9	64	235	667

Berdasarkan data pada bulan Mei 2018 untuk kategori yang bersifat pengaduan informatif dengan 5 (lima) tema pengaduan dominan sebanyak 667 pengaduan dan tema lainnya sebanyak 510 pengaduan (total 1.177 pengaduan). Selengkapnya lihat tabel 6a per



provinsi.

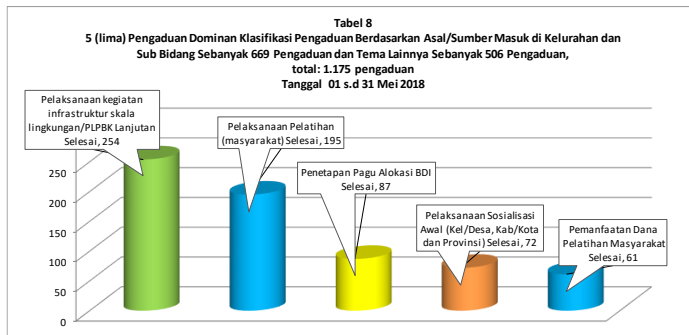
Pada kategori yang bersifat masalah pada bulan Mei 2018 pengaduan sebanyak 4 pengaduan (selesai 4 (100%), proses 0 (0%) pengaduan). Lihat tabel 7.

Selengkapnya lihat tabel 7a per provinsi.

MASALAH/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2	S U L A W E S I	G r a n d
	T	T o t a l
Pemanfaatan Dana Pelatihan Masyarakat	4	4
Grand Total	4	4

4. Pengaduan berdasarkan Asal/Sumber Masuk

Yang dimaksud dengan pengaduan berdasarkan sumber masuk adalah lokasi dimana



pengaduan tersebut berasal. Lokasi/keberadaan sumber masuk pengaduan terdiri dari 5 (lima) sumber, yaitu: di Kelurahan, Kecamatan, Kab/Kota, Provinsi, dan Pusat.

Pengaduan berdasarkan sumber

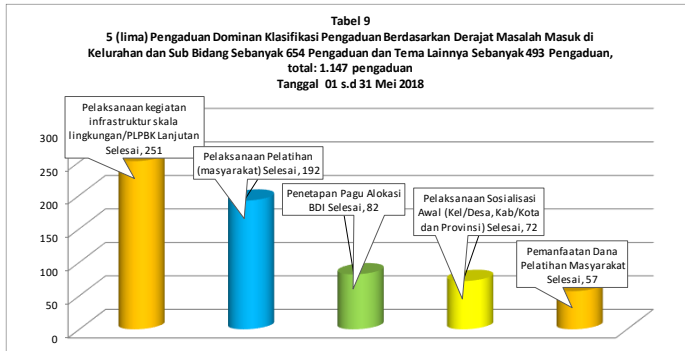
masuk adalah lokasi dimana pengaduan tersebut berasal, klasifikasi pengaduan berdasarkan asal/sumber masuk di Kelurahan pada bulan Mei 2018

Tabel 8a		B A L I	D I Y O G Y A K A R T A	G O R O N T A L O	J A W A	J A W A	K A L I M A N T A N	K A L I M A N T A N	K A L I M A N T A N	M A L U K U	M A L U K U	N U S A	N U S A	P A P U A	P A P U A	S U L A W E S I	S U L A W E S I	S U L A W E S I	S U L A W E S I	G r a n d
SUMBER ADUAN/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2																				T o t a l
☐ Pelaksanaan kegiatan infrastruktur skala lingkungan/PLPBK Lanjutan		5	13	23	6	23	20	8	2	6	10	2	2	1	20	6	18	89	254	
Selesai		5	13	23	6	23	20	8	2	6	10	2	2	1	20	6	18	89	254	
☐ Pelaksanaan Pelatihan (masyarakat)		2	11	10	51	4	20	2	1	2	1	7	3	1	2	6	28	44	195	
Selesai		2	11	10	51	4	20	2	1	2	1	7	3	1	2	6	28	44	195	
☐ Penetapan Pagu Alokasi BDI		1	1	8	5	10	1	1	1	7	5	3	4	9	17	16	87			
Selesai		1	1	8	5	10	1	1	1	7	5	3	4	9	17	16	87			
☐ Pelaksanaan Sosialisasi Awal (Kel/Desa, Kab/Kota dan Provinsi)												2				1	6			63
Selesai												2				1	6			63
☐ Pemanfaatan Dana Pelatihan Masyarakat		1	4	10	1	1	6	3	1	1	2							7	1	23
Selesai		1	4	10	1	1	6	3	1	1	2							7	1	23
Grand Total		3	21	33	83	16	59	23	11	4	10	20	16	5	5	7	41	13	64	235

dengan 5 (lima) pengaduan dominan ada 669 pengaduan dan tema lainnya ada 506 pengaduan (total selesai 1.175 pengaduan).

Selengkapnya lihat tabel 8a per provinsi.

5. Pengaduan berdasarkan Derajat Masalah



Derajat masalah menggambarkan tingkat/jenjang di mana pengaduan seharusnya dapat dikelola untuk mendapatkan solusi/penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Derajat masalah juga menggambarkan tingkat otoritas

atau kewenangan dalam memfasilitasi pengaduan. Walaupun begitu jenjang dibawahnya tetap dilibatkan dalam memfasilitasi pengaduan. Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka pengaduan terbagi dalam lima tingkatan, yaitu : Derajat 1: tingkat Kelurahan/Desa. Derajat 2: tingkat Kecamatan. Derajat 3: tingkat Kabupaten/Kota. Derajat 4: tingkat KMW/Propinsi dan Derajat 5: Tingkat Pusat.

Pada bulan Mei 2018 penanganan pengaduan terbanyak pada tingkat kelurahan dengan 5 (lima) pengaduan dominan sejumlah 654 pengaduan dan tema lainnya sejumlah 493 pengaduan (total 1.147 pengaduan).

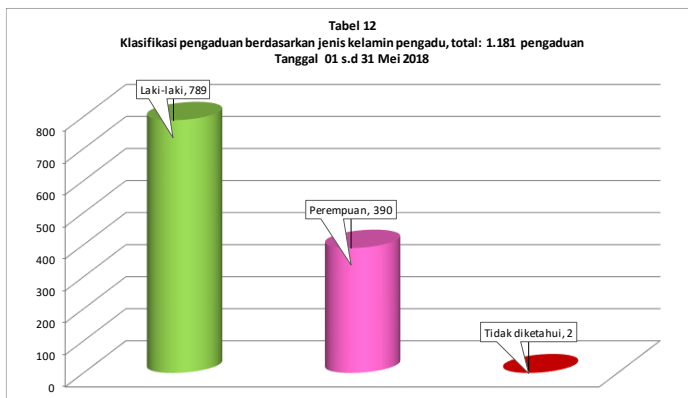
Tabel 9a berdasarkan per provinsi.

DERAJAT/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2	D	I	Y	G	J	J	K	K	K	M	N	N	P	S	S	S	S	G	r	a	n	d	T	o	t	a	i
Pelaksanaan kegiatan infrastruktur skala lingkungan/PLPBK Lanjutan	5	13	23	6	23	18	8	2	6	10	1	2	1	20	6	18	89	251									
Selesai	5	13	23	6	23	18	8	2	6	10	1	2	1	20	6	18	89	251									
Pelaksanaan Pelatihan (masyarakat)	2	11	10	51	4	20		1	1	2	1	7	3	1	2	6	28	42	192								
Selesai	2	11	10	51	4	20		1	1	2	1	7	3	1	2	6	28	42	192								
Penetapan Pagu Alokasi BDI	1		8	5	10		1		1	6	4		3	4	9	17	13	82									
Selesai	1		8	5	10		1		1	6	4		3	4	9	17	13	82									
Pelaksanaan Sosialisasi Awal (Kel/Desa, Kab/Kota dan Provinsi)										2				1	6		63	72									
Selesai										2				1	6		63	72									
Pemanfaatan Dana Pelatihan Masyarakat	1	3	10	1	1	6	3		1	1	1					7	1	21	57								
Selesai	1	3	10	1	1	6	3		1	1	1					7	1	21	57								
Grand Total	3	20	33	83	16	59	21	10	4	10	18	14	5	5	7	41	13	64	228	654							

2018 pengaduan yang paling banyak berdasarkan pelaku yang diadukan adalah BKM/LKM dengan jumlah 460 pengaduan. Tabel 11a di bawah berdasarkan per provinsi.

Tabel 11A PELAKU YANG DIADUKAN/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2		BAL I	D . I . Y O G Y A K A R T A	G O R O N T A L O	J A W A T E N G G A H	J A W A T I M U R	K A L I M A N T A N S E L A T A N	K A L I M A N T A N T E N G G A H	K A L I M A N T A N T I M U R	M A L U K U	M A L U K U T A R A	N U S A T E N G G A R A B A R A T	N U S A T E N G G A R A T I M U R	P A P U A	P A P U A B A R A T	S U L A W E S I B A R A T	S U L A W E S I S E L A T A N	S U L A W E S I T E N G G A H	S U L A W E S I T E N G G A R A	S U L A W E S I U T A R A	G r a n d T o t a l
BKM/LKM		3	50	56	59	20	41	22	14	1	16	9	14	2	5	15	17	79	37	460	
Faskel/SF		3	7		30	3	88	22	7	7	2	12	6	1	2	45	33	45	125	438	
Korkot		2			3	11				6			8	5	6	3			2	3	125
KMP/Proyek			2		6	1		3				1	2		2	15					57
KMW/OC/OSP					1			2													34
KSM				2	2	2			7	1				1		2		2	1		28
Aparat Kel/Kec		1			1	1			3	1			4				10	2			26
Aparat Kab/Prov					2				1										1		7
Kontraktor/Jasa Konsultan						1			4								1				6
Grand Total		9	59	58	104	39	129	49	42	8	20	30	31	10	12	17	72	56	129	307	1181

8. Pengaduan Berdasarkan Jenis Kelamin



Laki-laki dengan jumlah 789 pengaduan. Tabel 12a berdasarkan per provinsi.

Tabel 12A JENIS KELAMIN PENGADU/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU WILAYAH 2		BAL I	D . I . Y O G Y A K A R T A	G O R O N T A L O	J A W A T E N G G A H	J A W A T I M U R	K A L I M A N T A N S E L A T A N	K A L I M A N T A N T E N G G A H	K A L I M A N T A N T I M U R	M A L U K U	M A L U K U T A R A	N U S A T E N G G A R A B A R A T	N U S A T E N G G A R A T I M U R	P A P U A	P A P U A B A R A T	S U L A W E S I B A R A T	S U L A W E S I S E L A T A N	S U L A W E S I T E N G G A H	S U L A W E S I T E N G G A R A	S U L A W E S I U T A R A	G r a n d T o t a l
Laki-laki		8	42	21	76	33	102	36	32	5	14	25	23	8	6	8	50	39	89	172	789
Perempuan		1	17	37	28	6	27	13	8	3	6	5	8	2	6	9	22	17	40	135	390
Tidak diketahui							2														2
Grand Total		9	59	58	104	39	129	49	42	8	20	30	31	10	12	17	72	56	129	307	1181

Penutup

Dalam laporan bulan Mei 2018 ini dapat disampaikan bahwa Program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) wilayah 2 (dua) berjumlah 1.181 pengaduan (selesai 1.179 (99,8%), proses 2 (0,2%) pengaduan), sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan program KOTAKU pencegahan & peningkatan kumuh tingkat kota pengaduannya didominasi oleh Provinsi Sulawesi Utara (88 pengaduan) dan Provinsi Jawa Tengah (29 pengaduan).

Adapun untuk pengaduan dalam pelaksanaan kegiatan program KOTAKU pencegahan dan peningkatan kumuh tingkat Kelurahan/Desa (800 pengaduan) yang paling banyak diadakan adalah mengenai Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPBK Lanjutan (255 pengaduan atau 32%) sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan dan peningkatan kumuh tingkat Kabupaten/Kota (328 pengaduan) yang paling banyak diadakan adalah mengenai penetapan pagu alokasi BDI (88 pengaduan atau 31%), dan untuk lokasi bekas dampingan PNPM Mandiri Perkotaan (99 pengaduan) yang banyak diadakan adalah pelaksanaan kegiatan pemilu BKM (PNPM Mandiri Perkotaan) (28 pengaduan atau 28%).

Pada laporan PIM ini seluruh Provinsi mengirimkan data pengaduannya. Untuk kenyamanan penginputan data, PIM Pusat berusaha untuk memperbaiki format isian manual PIM agar menjadi lebih mudah dan diupayakan SIM PIM On-Line berbasis website dapat segera dioperasionalkan.